



## Pengertian “Politik Pendidikan” dan Perbedaannya dengan “Pendidikan Politik” dan “Politisasi Pendidikan”

Derri Adi Fernando<sup>\*1</sup>, M. Sirozi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: [derriadifernando@gmail.com](mailto:derriadifernando@gmail.com), [m.sirozi@radenfatah.ac.id](mailto:m.sirozi@radenfatah.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-10-12 Revised: 2023-11-23 Published: 2023-12-28  <b>Keywords:</b> <i>Political Education; Education Politics; The Politicization of Education.</i>	<p>This study aims to provide a clear understanding of the meaning of educational politics and its differences from political education and the politicization of education. The method used in this research is library research, which collects data and information from various sources related to the topic. This study discusses the meaning of educational politics. The politics of education refers to the processes of decision making, policy implementation, and distribution of power related to the education system within a country or region. The politics of education includes aspects such as determining the curriculum, allocating resources, managing educational institutions, and the influence of political policies on the education system. As well as reviewing the politicization of education and distinguishing it from educational politics. The politicization of education occurs when education is used as a means to propagate certain ideologies or political goals. Usually, the politicization of education is carried out by parties who have political interests to influence the thoughts and attitudes of individuals through the education system. In this study, data and information were obtained through literature study from various books, journal articles and other trusted sources. The analysis was carried out by comparing the concepts and characteristics of educational politics, political education, and the politicization of education. The findings of this study provide a clearer understanding of the meaning of political education and its differences from political education and the politicization of education. This research makes an important contribution to the discussion about the relationship between politics and education and its implications in the current educational context.</p>
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-10-12 Direvisi: 2023-11-23 Dipublikasi: 2023-12-28  <b>Kata kunci:</b> <i>Pendidikan Politik; Politik Pendidikan; Politisasi Pendidikan.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang pengertian politik pendidikan serta perbedaannya dengan pendidikan politik dan politisasi pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber pustaka terkait dengan topik tersebut. Penelitian ini membahas pengertian politik pendidikan. Politik pendidikan merujuk pada proses pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan distribusi kekuasaan yang terkait dengan sistem pendidikan dalam suatu negara atau wilayah. Politik pendidikan mencakup aspek-aspek seperti penetapan kurikulum, alokasi sumber daya, pengaturan lembaga pendidikan, dan pengaruh kebijakan politik pada sistem Pendidikan. Serta mengulas politisasi pendidikan dan membedakannya dari politik pendidikan. Politisasi pendidikan terjadi ketika pendidikan digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi atau tujuan politik tertentu. Biasanya, politisasi pendidikan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik untuk mempengaruhi pikiran dan sikap individu melalui sistem pendidikan. Dalam penelitian ini, data dan informasi diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber tepercaya lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan konsep dan karakteristik politik pendidikan, pendidikan politik, dan politisasi pendidikan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pengertian politik pendidikan dan perbedaannya dengan pendidikan politik dan politisasi pendidikan. Penelitian ini memberikan sumbangan penting bagi diskusi tentang hubungan antara politik dan pendidikan serta implikasinya dalam konteks pendidikan saat ini.</p>
<b>I. PENDAHULUAN</b> Pendidikan dan politik adalah dua bidang yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kaitan antara keduanya dapat dilihat dalam	konsep "politik pendidikan", "pendidikan politik", dan "politisasi pendidikan". Meskipun terdengar mirip, ketiga istilah ini memiliki makna yang berbeda dan menggambarkan aspek

yang berbeda pula dalam hubungan antara politik dan pendidikan.

1. Politik Pendidikan:

Politik pendidikan merujuk pada kebijakan, strategi, dan praktik yang terkait dengan pendidikan di suatu negara atau sistem pendidikan. Hal ini mencakup keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga politik lainnya untuk membentuk dan mengatur sistem pendidikan. Politik pendidikan berfokus pada isu-isu seperti pendanaan pendidikan, kurikulum, standar pendidikan, pengembangan tenaga pendidik, pengelolaan sekolah, dan aksesibilitas pendidikan bagi semua individu. Tujuan politik pendidikan adalah untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik, merata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pendidikan Politik:

Pendidikan politik merujuk pada proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar politik dan aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan politik berfokus pada pemberian pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, debat publik, dan advokasi kebijakan. Tujuan pendidikan politik adalah untuk mengembangkan kesadaran politik, pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, pengetahuan tentang sistem politik, dan keterampilan untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat demokratis.

3. Politisasi Pendidikan:

Politisasi pendidikan merujuk pada situasi di mana pendidikan digunakan atau dimanipulasi oleh aktor politik atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan politik mereka. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi alat politik yang digunakan untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu, memperkuat pandangan politik tertentu, atau memanipulasi narasi sejarah. Politisasi pendidikan sering kali terjadi ketika pemerintah atau kelompok politik memanfaatkan kurikulum, buku teks, atau pengajaran untuk mempromosikan ideologi tertentu, mengaburkan fakta, atau menyensor informasi yang tidak sesuai dengan pandangan politik mereka.

Perbedaan antara politik pendidikan, pendidikan politik, dan politisasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut: politik pendidikan berkaitan dengan kebijakan dan praktik pendidikan yang diterapkan oleh

pemerintah atau lembaga politik, pendidikan politik adalah proses pendidikan untuk membentuk warga negara yang sadar politik, sedangkan politisasi pendidikan mencakup penggunaan pendidikan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, hubungan antara politik dan pendidikan memiliki pengaruh yang saling mempengaruhi. Sementara politik pendidikan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, pendidikan politik berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat partisipasi politik warga negara. Namun, politisasi pendidikan dapat mengancam kemandirian, pluralisme, dan objektivitas pendidikan, serta mengabaikan tujuan pendidikan yang seharusnya bersifat nonpolitik, seperti pengembangan potensi individu dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman umum.

## II. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian tulisan ini menggunakan *Library Research* atau disebut dengan *riset literatur*, yang mana riset literatur ini untuk memperoleh data penelitian, bersumber dari *buku, serta jurnal*, yang berkaitan dengan tema Pendidikan politik dan politik Pendidikan serta politisasi pendidikan. Dalam riset literatur ini peneliti berhadapan langsung dengan teks bukan dengan pengetahuan yang langsung turun kelapangan, walaupun demikian dalam riset literatur ini peneliti berusaha menela'ah dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan tema tersebut

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Politik Pendidikan

Secara etimologi, kata politik berakar dari bahasa Inggris *politic* adalah sinonim dari kata *wise* dan *sensible* yang berarti tindakan, bijaksana, kebijaksanaan atau kebijakan (Hoddin, 2020, p. 18). Literasi politik merupakan aspek urgent dalam kegiatan konsolidasi politik (Bashori, 2018, p. 290). Proses pendidikan merupakan upaya sadar insan yang tidak akan pernah ada hentinya (Sarnoto, 2012a, p. 63). Sebab, jika manusia berhenti melakukan proses pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia khususnya dinegara ini. Dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat berupaya untuk melakukan pendidikan dengan standar kualitas yang diinginkan untuk memberdayakan insan cendikia. "Sistem pendidikan yang dibangun harus disesuaikan dengan sebuah

tuntutan pada zamannya, agar pendidikan dapat menghasilkan outcome yang relevan dengan zaman.

Politik pendidikan dapat didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan, tindakan, dan interaksi politik yang berhubungan dengan pendidikan di suatu negara (Sarnoto, 2012b, p. 32). Hal ini melibatkan proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan politik yang berdampak pada sistem pendidikan dan peserta didik dan dapat dikatakan sebagai ilmu induk segala ilmu (*POLITICON: Jurnal ilmu politik*, 2019, p. 123). Politik pendidikan mencakup aspek-aspek seperti perumusan kebijakan pendidikan (Ph, 2014, p. 326), pengaturan struktur pendidikan, pengelolaan anggaran, kurikulum, evaluasi dan pengawasan pendidikan, serta distribusi sumber daya pendidikan. Menurut Deliar Noer, politik ialah segala aktifitas yang selalu berkaitan dengan kekuasaan dengan hal ini dapat mengubah atau mempertahankan segala bentuk susunan masyarakat (Deliar Noer, 1982, p. 11-12).

## 2. Peran Politik Pendidikan:

Peran politik pendidikan merujuk pada upaya pemerintah dan institusi politik dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perkembangan masyarakat dan negara (Pasaribu, 2017, p. 53). Oleh karena itu, politik pendidikan berperan dalam membentuk kebijakan, mengatur regulasi, dan mengalokasikan sumber daya untuk memastikan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi semua individu. Berikut adalah beberapa peran politik pendidikan yang relevan:

- a) Penentuan Kebijakan Pendidikan: Politik pendidikan mencakup proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Pemerintah dan lembaga politik lainnya memiliki peran dalam menentukan visi, misi, tujuan, dan prioritas dalam sistem pendidikan. Mereka juga menentukan kebijakan terkait kurikulum, metode pengajaran, evaluasi, dan standar pendidikan.
- b) Regulasi dan Standarisasi: Politik pendidikan melibatkan penetapan dan penegakan regulasi untuk mengatur fungsi dan tata kelola sistem pendidikan. Hal ini meliputi pembentukan peraturan mengenai kualifikasi guru, sertifikasi, akreditasi sekolah,

dan proses evaluasi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan integritas pendidikan yang diselenggarakan di negara tersebut.

- c) Pembiayaan Pendidikan: Politik pendidikan juga mencakup alokasi sumber daya keuangan untuk mendukung sistem pendidikan. Pemerintah harus membuat keputusan tentang anggaran pendidikan, termasuk pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, pengadaan bahan ajar, dan beasiswa bagi siswa yang membutuhkan.
- d) Akses dan Kesenjangan: Politik pendidikan berperan dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama (Abdullah, 2013, p. 225), atau etnis. Politik pendidikan harus mendorong inklusi dan juga mengatasi kesenjangan dalam akses dan kesempatan pendidikan. Ini dapat melibatkan kebijakan khusus untuk memfasilitasi akses bagi kelompok yang rentan, seperti anak-anak miskin, anak-anak dengan disabilitas, atau kelompok minoritas.
- e) Pengawasan dan Evaluasi: Politik pendidikan juga melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Pemerintah perlu memantau dan mengevaluasi kualitas dan kinerja sekolah, guru, dan siswa. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan pendidikan.

Menurut Budiarto fungsi dari partai politik yaitu; sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana sosialisasi, sarana rekrutmen politik, sarana pengaturan konflik (Budiarto, 2000, p. 166-168). Peran politik pendidikan sangat penting karena kebijakan dan tindakan politik yang tepat dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, politik pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik dan dapat menjadi sumber konflik dan kontroversi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa politik pendidikan dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan dalam kepentingan terbaik bagi semua warga negara (Wiratma, n.d., p. 111).

### 3. Tujuan Politik Pendidikan

Tujuan politik pendidikan merujuk pada serangkaian tujuan dan orientasi yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan dalam mengatur dan mengarahkan sistem pendidikan dalam suatu negara. Tujuan politik pendidikan dapat bervariasi antara negara dan waktu, tetapi umumnya melibatkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a) Akses dan Kesetaraan: Salah satu tujuan politik pendidikan yang penting adalah memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan. Ini berarti memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau faktor-faktor lainnya dalam mendapatkan pendidikan. Pemerintah berusaha untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua individu, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu atau daerah terpencil.
- b) Kualitas Pendidikan: Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dan up-to-date, serta meningkatkan standar pengajaran dan pembelajaran. Tujuan ini melibatkan pengembangan guru yang berkualitas, peningkatan fasilitas fisik, dan penerapan metode pengajaran yang efektif. Pemerintah juga dapat berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan akses terhadap teknologi pendidikan, pelatihan profesional, dan penilaian kinerja siswa.
- c) Pembentukan Warga Negara yang Berkualitas: Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab, terdidik, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah juga sering menekankan pentingnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan sosial, etika, kritis, dan pemecahan masalah, serta pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan juga nilai-nilai kewarganegaraan. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan demokratis.
- d) Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan: Pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja dan berkontribusi

pada pembangunan ekonomi negara. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk keahlian teknis, vokasional, dan kewirausahaan. Tujuan ini juga melibatkan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan penelitian untuk memajukan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas.

- e) Pemajuan Penelitian dan Inovasi: Pemerintah sering mengutamakan pendidikan sebagai sumber pengetahuan dan penelitian. Tujuan ini melibatkan peningkatan investasi dalam penelitian dan juga pengembangan pendidikan, serta mendorong kolaborasi antara lembaga pendidikan, industri, dan lembaga penelitian. Pemerintah berharap agar melalui pendidikan, inovasi dan penemuan baru dapat memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan membantu menyelesaikan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa tujuan politik pendidikan dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks setiap negara. Tujuan yang dijelaskan di atas hanya merupakan contoh umum yang dapat ditemukan dalam banyak negara.

### 4. Implikasi Politik Pendidikan

Kebijakan politik pendidikan memiliki implikasi yang signifikan dalam masyarakat. Beberapa implikasi politik pendidikan yang dapat terjadi antara lain:

- a) Kesenjangan Pendidikan: Kebijakan politik pendidikan yang tidak memperhatikan kesetaraan akses atau pengalokasian sumber daya yang tidak adil dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan antara kelompok-kelompok masyarakat.
- b) Standar Pendidikan: Kebijakan politik pendidikan mempengaruhi penentuan standar pendidikan, kurikulum, dan proses evaluasi, yang dapat memengaruhi hasil belajar dan kualitas Pendidikan (*Nuansa Politisasi Dalam Pelaksanaan Tugas Guru.Pdf*, N.D., P. 283).
- c) Pengaruh Ideologi: Politik pendidikan sering kali terpengaruh oleh ideologi dan kepentingan politik tertentu, yang dapat mempengaruhi isi dan arah pendidikan yang diajarkan.

- d) Perubahan Sosial: Politik pendidikan juga dapat menjadi alat untuk membawa perubahan sosial dalam masyarakat, seperti mempromosikan kesadaran lingkungan, mengatasi diskriminasi, atau mengubah pandangan masyarakat terhadap isu-isu tertentu.

## 5. Pengertian Pendidikan Politik

Kehidupan politik sangat mempengaruhi penyelenggaraan dalam proses Pendidikan, sebaliknya Pendidikan ialah institusi yang memiliki peranan dalam pengembangan bidang politik (*Pendidikan Politik Dan Politik Pendidikan.Pdf*, n.d., p. 22). Pendidikan politik adalah suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterlibatan individu dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik. Pendidikan politik memiliki fokus pada aspek politik dalam masyarakat, seperti sistem politik, proses pengambilan keputusan, partisipasi politik, hak dan kewajiban politik, serta nilai-nilai demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi tentang politik kepada individu, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan kritis dan analitis mereka dalam memahami dan mengevaluasi isu-isu politik (Nurdin, 2019, p. 150). Melalui pendidikan politik, individu diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur politik, proses demokrasi, hak-hak warga negara, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik.

Tujuan dari pendidikan politik adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan, sadar akan hak-hak politik mereka, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam proses politik. Pendidikan politik juga bertujuan untuk menghasilkan individu yang memiliki sikap toleransi, menghargai kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan, serta mampu berdialog dan berkolaborasi dengan orang-orang dengan pandangan politik yang berbeda. Pendidikan politik dapat dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan formal di sekolah-sekolah dan universitas, pendidikan non-formal melalui pelatihan dan lokakarya, hingga pendidikan informal melalui media massa dan lingkungan sekitar. Dalam pendidikan politik, berbagai metode pembelajaran dapat digunakan, seperti diskusi, simulasi,

studi kasus, dan kegiatan partisipatif lainnya. Dengan pemahaman tentang pendidikan politik, individu dapat menjadi aktor yang lebih berperan dalam masyarakat dan sistem politik. Mereka dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, berkontribusi dalam pembuatan kebijakan publik, serta mendorong perubahan sosial yang positif melalui aksi politik yang terinformasi dan bertanggung jawab.

## 6. Pengertian Politisasi Pendidikan

Politisasi pendidikan mengacu pada penggunaan pendidikan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi atau tujuan politik tertentu (P. Lamadang et al., 2022, p. 68). Politisasi pendidikan terjadi ketika lembaga pendidikan, kurikulum, atau proses pembelajaran digunakan untuk mengadvokasi atau mempengaruhi pandangan politik tertentu kepada siswa atau masyarakat. Dalam politisasi pendidikan, tujuan politik mendominasi tujuan pendidikan yang seharusnya objektif dan berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang luas. Politisasi pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk (Puwanto, n.d., p. 4), mulai dari pengubahan isi kurikulum dengan tujuan mempromosikan pandangan politik tertentu, pengarahan atau kontrol ideologis terhadap tenaga pendidik, hingga manipulasi informasi atau narasi yang disampaikan kepada siswa.

Politik dan ideologi yang dikaitkan dengan politisasi pendidikan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, kelompok politik, agen politik eksternal, atau kelompok masyarakat tertentu. Politisasi pendidikan sering kali terjadi dalam konteks konflik politik atau perubahan kekuasaan di suatu negara atau wilayah, di mana pendidikan digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik atau mencapai tujuan politik tertentu. Dampak politisasi pendidikan dapat sangat signifikan. Politisasi pendidikan dapat menyebabkan pembatasan kebebasan akademik, ketidaknetralan dalam penyampaian pengetahuan, pembentukan sikap yang terbatas, serta polarisasi masyarakat yang lebih dalam. Politisasi pendidikan juga dapat menghambat perkembangan pemikiran kritis, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat. Penting untuk mempertahankan kemandirian dan kebebasan lembaga pendidikan dalam

menyampaikan pendidikan yang objektif dan tidak terpengaruh oleh agenda politik tertentu. Pendidikan yang bebas dari politisasi penting untuk memastikan bahwa individu diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemikiran yang mandiri, kritis, dan inklusif, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai perspektif politik yang ada.

## 7. Perbedaan antara Pendidikan Politik dan Politisasi Pendidikan:

### a) Fokus dan Tujuan:

- 1) Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem politik, partisipasi politik, dan hak dan kewajiban warga negara.
- 2) Politisasi pendidikan bertujuan untuk memanipulasi pendidikan untuk mencapai tujuan politik tertentu atau memperkuat kekuasaan politik.

### b) Pendekatan:

- 1) Pendidikan politik bersifat objektif, memberikan pemahaman yang seimbang tentang berbagai perspektif politik.
- 2) Politisasi pendidikan bersifat subjektif, sering kali mengarah pada penekanan pada pandangan politik tertentu atau penyalahgunaan pendidikan sebagai alat propaganda.

### c) Kebebasan Akademik:

- 1) Pendidikan politik mendukung kebebasan akademik dan pluralisme dalam pemikiran dan penelitian.
- 2) Politisasi pendidikan sering kali melibatkan pembatasan kebebasan akademik dan mengontrol isi dan narasi pendidikan.

### d) Konteks:

- 1) Pendidikan politik terintegrasi dalam kurikulum pendidikan formal dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik.
- 2) Politisasi pendidikan terjadi ketika pendidikan digunakan sebagai alat politik untuk mempengaruhi pemikiran dan juga keyakinan individu atau masyarakat.

Penting untuk membedakan antara pendidikan politik yang sehat dan objektif dengan politisasi pendidikan yang dapat mengganggu tujuan utama pendidikan. Pendidikan politik yang baik harus mendorong pemahaman, partisipasi, dan pemikiran

kritis tanpa adanya campur tangan politik yang tidak sehat atau manipulatif.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Politik Pendidikan: Merujuk pada serangkaian kebijakan, prinsip, dan proses politik yang terkait dengan sistem pendidikan dalam suatu negara. Politik pendidikan berfokus pada pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan perencanaan strategis dalam konteks pendidikan.

Pendidikan Politik: Merujuk pada pendidikan atau proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman politik, keterlibatan aktif dalam proses politik, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik masyarakat. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar politik dan dapat berkontribusi dalam pembangunan demokrasi.

Politisasi Pendidikan: Merujuk pada situasi di mana pendidikan atau lembaga pendidikan secara tidak tepat digunakan sebagai alat atau arena politik oleh pihak-pihak tertentu. Politisasi pendidikan dapat terjadi ketika lembaga pendidikan dimanipulasi untuk menyebarkan pandangan politik tertentu, membatasi kebebasan akademik, atau menghilangkan pluralitas dan objektivitas dalam pengajaran.

Perbedaan antara ketiga konsep ini terletak pada fokus dan tujuan masing-masing. Politik pendidikan berkaitan dengan kebijakan dan proses politik dalam sistem pendidikan, sedangkan pendidikan politik berfokus pada pembelajaran dan pengembangan pemahaman politik. Di sisi lain, politisasi pendidikan merujuk pada penyalahgunaan pendidikan sebagai alat politik.

### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pengertian "Politik Pendidikan" dan Perbedaannya dengan "Pendidikan Politik" dan "Politisasi Pendidikan".

## DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, A. (2013). *Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia*.

- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287-310.  
<https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Budiarjo, M., (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Pustaka Utama
- Deliar Noer, (1982) *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali.
- Hodidin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15.  
<https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>
- Nuansa Politisasi Dalam Pelaksanaan Tugas Guru.Pdf. (N.D.).
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144-166.  
<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>
- P. Lamadang, K., Karlina, D. A., Nuraini, R. Z., & Febriani, W. D. (2022). Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 63-76.  
<https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.898>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51.  
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Pendidikan politik dan politik pendidikan.pdf. (n.d.).
- Ph, S. (2014). *Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-2. 3. Politicon: Jurnal Ilmu Politik*. (2019).
- Puwanto, N. A. (N.D.). *PENGARUH POLITIK DALAM BIDANG PENDIDIKAN. 02.*
- Sarnoto, A. Z. (2012a). *Inamika Pendidikan dalam perspektif politik pendidikan. 02.*
- Sarnoto, A. Z. (2012b). *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia.*
- Wiratma, I. G. L. (N.D.). *Politik Pendidikan Dalam Pengembangan Kesadaran Kritis Dan Jati Diri.*